

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK MENGENAI FUNGSI PAJAK,
PERSEPSI WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN SANKSI DENDA,
PELAYANAN FISKUS, DAN SPPT TERHADAP KEBERHASILAN
PENERIMAAN PBB KOTA PEKANBARU**

Oleh:

Rizka Wahyuni Siregar

Pembimbing : Hardi dan Edfan Darlis

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : rizkawahyuni17@gmail.com

*The Influence Of Taxpayer Attitudes regarding the Tax Function, Perception Taxpayer in
The Implementation of Financial Penalties, The Service Tax Authorities, and SPPT With
PBB Income success*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect caused by the variable The Attitudes regarding the Tax Function, Perception of Tax payers on The Implementation of Financial Penalties, The Service Tax Authorities, and SPPT With PBB Income success. This study uses convenience sampling with 100 samples obtained from the calculation formula slovin. The data collection techniques in this study is in the form of questionnaires, while data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 17 for Windows. From the results of the testing that has been done, simultaneous regression test (F test) showed that all independent variables studied have a simultaneous effect on the variable PBB Income success. Partial regression test (t test) showed that all independent variables studied partial effect on the variable The land and Building Tax Income success. The magnitude of the effect caused by Adjusted R² by four variables together against the dependent variable 65,4%, while the remaining 34,6% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Taxpayer Attitudes, Perception Tax payers, Service Tax, and SPPT

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat namun sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan kembali ke daerah yang memungutnya sebesar 81%. 16,2% dari total penerimaan PBB untuk daerah Tingkat I dan 64,8% untuk Daerah Tingkat II. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memang bukan suatu

pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri (Pardi,2009).

Dalam dinamika perkembangan dan pertumbuhan kota Pekanbaru sekarang ini, banyak masyarakat mendirikan bangunan baru. Sehingga setiap periodenya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah akan menetapkan target pajak yang akan

dicapai yang tercantum dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah data realisasian penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru yang diperoleh dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Pekanbaru. pada tahun 2012 target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 38.500.000.000 dan realisasian PBB sebesar Rp 41.047.966.395 pada tahun ini penerimaan PBB dikatakan berhasil karena realisasiaanya telah melebihi target penerimaan. Sedangkan Pada tahun 2013, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Pekanbaru menaikkan target penerimaan sebesar Rp 42.025.371.685 namun realisasian yang terjadi pada tahun 2013 tidak memenuhi target yaitu sebesar 38.348.010.031. seperti dilansir pada website h4lloriau.com realisasi pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) kota pekanbaru pada tahun 2014 mencapai 38.000.000.000 dari target 52.000.000.000 . jadi pada tahun 2014 realisasi pungutan pajak bumi dan bangunan tidak optimal karena tidak mencapai target yang ditentukan (www.h4lloriau.com 2014).Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya keinginan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan yang sesuai dengan fungsi *budgetair* adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rate*. Sebagai perbandingan antara tingkat kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak dengan pokok

ketetapanannya pada tahun yang bersangkutan, sehingga jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam penerimaan perpajakannya.

Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan dapat mendongkrak tingkat penerimaan pajak semakin tinggi sehingga target Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bagian dari pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dapat terus tercapai. Untuk itu perlu dibahas secara mendalam tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah faktor *tax prayer* yaitu faktor pada diri wajib pajak yang terdiri dari sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pelayanan fiskus dan juga mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Indrawijaya,2000 :40). Sikap juga merupakan cermin dari pengetahuan dan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Sebagaimana Katz dalam Fauziyah (2008) mengemukakan bahwa salah satu fungsi sikap adalah fungsi pengetahuan, dimana bila seseorang

mempunyai suatu sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut terhadap objek sikap yang bersangkutan. Jadi, jika seorang mengetahui dengan jelas apa sebenarnya fungsi pajak itu sendiri maka kemungkinan mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak, dengan demikian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Prihartanto,2013). sehingga jika pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak baik, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lancar dan tanpa ada hambatan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB : persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figure, kondisi, atau masalah tertentu. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang

kurang keras terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya (Pardi,2009).

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, dll (Prihartanto,2013).

Optimalnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, sangat besar andilnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mewujudkan semuanya termasuk keberhasilan penerimaan pajak. Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika,2006 :77). Di sini jika wajib pajak memiliki sikap dan respon yang tinggi terhadap kewajibannya dalam melakukan

perpajakan, mereka akan tahu apa sebenarnya fungsi dari perpajakan itu sendiri terutama fungsi dari membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, sikap wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku atau sikap wajib pajak dan keberhasilan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laily Fauziah (2008) mengenai sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₁ : Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan sanksi denda terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Menurut Walgito dalam Siti dan Adi (2008) Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu/proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Sedangkan Sanksi Pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma (Tjahjono,2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2008), didalam penelitiannya juga disebutkan bahwa Persepsi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₂ : Persepsi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Sanksi Denda berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Cindy dan Yenni ,2013). Dengan demikian, jika semakin baiknya pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sobrotul imtikhanah dan Nin Sulistyowati

(2011) mengenai pelayanan fiskus berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₃ : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Pengaruh SPPT Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, penetapan NJOP, dll (Prihartanto, 2013). Dengan demikian wajib pajak mengetahui seberapa besar pajak yang akan dibayar yang nantinya dan memperkecil kesalahan mengenai NJOP tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Christian Danang Prihartanto (2013) mengenai SPPT, menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan waib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₄ : SPPT berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan

Bangunan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sampai dengan periode Desember 2013 dan minimal terdaftar sejak Januari 2009 yaitu sebanyak 252.000 Wajib Pajak PBB. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sampai dengan periode Desember 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel yang mudah (*convenience sampling*). Seperti namanya, pengambilan sampel yang mudah (*convenience sampling*) merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya (sekaran, 2007 : 30).

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Keberhasilan penerimaan didefinisikan sebagai kepatuhan pembayar PBB dan juga kegiatan administrasi PBB. Dimana indikator yang digunakan yaitu pembayaran PBB yang tepat waktu, penerimaan pajak terhambat, pemungutan, pembagian hasil penerimaan, merasakan hasil penerimaan, sarana dan layanan gratis, pelayanan fasilitas, tidak merasakan manfaat pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pembangunan semakin baik. Variabel ini diukur dengan 10 pertanyaan dengan menggunakan Skala *Likert*.

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku atau sikap wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Dimana fungsi pajak yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prioritas pembangunan pemerintah. yang akan diukur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu tujuan pembangunan, tugas pemerintah, pemerintah memerlukan dana, pembangunan tanggung jawab bersama dan yang akan diukur dari prioritas pembangunan pemerintah yaitu PBB adalah dana pembangunan, PBB adalah iuran rakyat, dalam menstabilkan pembangunan pemerintah memerlukan dana, pajak adalah sumber dana, pajak dari wajib pajak sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, transparansi pemerintah, berpartisipasi melaksanakan pembangunan, pembangunan negara, dana dari pajak, dan mengevaluasi pembangunan. Dalam variabel ini diukur dengan 12 pertanyaan. dengan menggunakan Skala *Likert*.

Persepsi wajib pajak mengenai sanksi denda PBB adalah sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap responden tersebut. Dimana indikator yang digunakan yaitu denda PBB 2%, sanksi pelaksanaan denda bunga, pembayaran pajak dilakukan sebelum jatuh tempo, perhitungan pelaksanaan sanksi denda, membayar PBB terlambat, pembayaran denda, dan pajak tidak memberatkan. Dalam variabel ini diukur dengan 8 pertanyaan dengan menggunakan Skala *Likert*.

Pelayanan fiskus adalah sikap yang berinteraksi dalam merasakan

bagaimana pelayanan fiskus (petugas pajak) yang sesungguhnya terjadi, fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, penentuan SPPT telah adil, fiskus memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, fiskus memperhatikan keberatan terhadap penggunaan PBB, cara membayar PBB adalah mudah. Dalam variabel ini diukur dengan 8 pertanyaan dengan menggunakan Skala *Likert*.

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sehingga wajib paja dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, kelas bangunan, Penetapan NJOP, dll. Dalam variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan dengan menggunakan Skala *Likert*.

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012:277).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kuesioner dan Demografi

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar

kepada responden penelitian yang berjumlah 130 orang. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 110 (85%). Sedangkan yang dapat diolah hanya 105 (95%), hal ini dikarenakan ada sebanyak 5 (5%) kuesioner yang tidak dapat diolah dari total kuesioner yang kembali. Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 85% tersebut, dikarenakan kuesioner disebarkan langsung kepada responden pada saat pada saat pelaporan dan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Dispenda Kota Pekanbaru.

2. Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa variabel sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak memiliki dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum 59 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 47.9333 dengan standar deviasi sebesar 3.56065. Variabel persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum 38 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31.4095 dengan standar deviasi sebesar 3.11231. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 47 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 39.6857 dengan standar deviasi sebesar 3.74760. variabel SPPT memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum 23 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 39.8000 dengan standar deviasi sebesar 1.95967. Variabel keberhasilan penerimaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum 45 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.4800 dengan standar deviasi sebesar 2.61063.

3. Hasil Pengujian Kualitas Data

3.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$ dengan α 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($105-2$) = 103, sehingga didapat r tabel untuk df (103) = 0,1918. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

| Varia bel | Item Pern yataa n | Koefi sien Koer lasi | Nilai Kritis | Kesim pulan |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Sikap WP Meng enai Fungs i Pajak | X1.1 | 0,600 | 0,1918 | Valid |
| | X1.2 | 0,442 | 0,1918 | Valid |
| | X1.3 | 0,583 | 0,1918 | Valid |
| | X1.4 | 0,504 | 0,1918 | Valid |
| | X1.5 | 0,614 | 0,1918 | Valid |
| | X1.6 | 0,592 | 0,1918 | Valid |
| | X1.7 | 0,700 | 0,1918 | Valid |
| | X1.8 | 0,511 | 0,1918 | Valid |
| | X1.9 | 0,477 | 0,1918 | Valid |
| | X1.1 0 | 0,535 | 0,1918 | Valid |
| | X1.1 1 | 0,436 | 0,1918 | Valid |
| | X1.1 2 | 0,440 | 0,1918 | Valid |

| | | | | |
|--|------|-------|--------|-------|
| Perse psi Wajib Pajak dalam Pelak sanaa n | X2.1 | 0,603 | 0,1918 | Valid |
| | X2.2 | 0,586 | 0,1918 | Valid |
| | X2.3 | 0,485 | 0,1918 | Valid |
| | X2.4 | 0,647 | 0,1918 | Valid |
| | X2.5 | 0,579 | 0,1918 | Valid |
| | X2.6 | 0,777 | 0,1918 | Valid |
| | X2.7 | 0,712 | 0,1918 | Valid |
| Sanks i Dend a | X2.8 | 0,535 | 0,1918 | Valid |

| | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|-------|
| Pelayanan Fiskus | X3.1 | 0,656 | 0,1918 | Valid |
| | X3.2 | 0,592 | 0,1918 | Valid |
| | X3.3 | 0,747 | 0,1918 | Valid |
| | X3.4 | 0,663 | 0,1918 | Valid |
| | X3.5 | 0,473 | 0,1918 | Valid |
| | X3.6 | 0,674 | 0,1918 | Valid |
| | X3.7 | 0,615 | 0,1918 | Valid |
| | X3.8 | 0,719 | 0,1918 | Valid |
| | X3.9 | 0,681 | 0,1918 | Valid |
| X3.10 | 0,475 | 0,1918 | Valid | |
| SPPT | X4.1 | 0,708 | 0,1918 | Valid |
| | X4.2 | 0,689 | 0,1918 | Valid |
| | X4.3 | 0,705 | 0,1918 | Valid |
| | X4.4 | 0,650 | 0,1918 | Valid |
| | X4.5 | 0,678 | 0,1918 | Valid |
| Penerimaan PBB | Y1 | 0,510 | 0,1918 | Valid |
| | Y2 | 0,550 | 0,1918 | Valid |
| | Y3 | 0,596 | 0,1918 | Valid |
| | Y4 | 0,693 | 0,1918 | Valid |
| | Y5 | 0,618 | 0,1918 | Valid |
| | Y6 | 0,465 | 0,1918 | Valid |
| | Y7 | 0,430 | 0,1918 | Valid |
| | Y8 | 0,467 | 0,1918 | Valid |
| | Y9 | 0,578 | 0,1918 | Valid |
| | Y10 | 0,717 | 0,1918 | Valid |

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari setiap item pertanyaan masing-masing variabel menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada r tabel, hal ini membuktikan bahwa setiap butir pertanyaan dari setiap variabel penelitian tersebut valid.

3.2 Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* (α) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,6. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

| Variabel | <i>Cronbach's Alpha</i> | Nilai Kritis | Kesimpulan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| Sikap WP Mengenai Fungsi Pajak | 0,775 | 0,6 | Reliabel |
| Persepsi WP dalam Pelaksanaan Sanksi Denda | 0,768 | 0,6 | Reliabel |
| Pelayanan Fiskus | 0,832 | 0,6 | Reliabel |
| SPPT | 0,714 | 0,6 | Reliabel |
| Keberhasilan Penerimaan PBB | 0,764 | 0,6 | Reliabel |

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* $>$ 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:147). Metode yang digunakan adalah dengan statistik *Kolmogorov Smirnov*. Alat uji ini biasa disebut dengan *K-S* yang tersedia dalam program *SPSS For Windows*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang di dapat dalam tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut di katakan berdistribusi normal bila $sig > alpha$

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | N | 105 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.50512609 |
| | Absolute | .056 |
| Most Extreme Differences | Positive | .038 |
| | Negative | -.056 |
| | Kolmogorov-Smirnov Z | .576 |
| | Asymp. Sig. (2-tailed) | .894 |

a. Test Distribution is Normal

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,894 > 0,05. Artinya data penelitian berdistribusi normal.

4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

| Model | Collinearity Statistics | |
|--|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 Sikap WP Mengenai Fungsi Pajak | .748 | 1.336 |
| Persepsi WP dalam Pelaksanaan Sanksi Denda | .559 | 1.670 |
| Pelayanan Fiskus | .718 | 1.393 |
| SPPT | .613 | 1.631 |

a. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBB

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model

regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini di lakukan dengan uji *Glejser* yakni dengan cara mengregresi nilai *absolute residual* dari model yang diestimasi terhadap variabel independen.

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | T | Sig. |
| 1 (Constant) | 1.094 | 1.396 | | .784 | .435 |
| Sikap WP Mengenai Fungsi Pajak | -.005 | .030 | -.021 | -.185 | .854 |
| Persepsi WP dalam Pelaksanaan Sanksi Denda | .025 | .038 | .085 | .657 | .513 |
| Pelayanan Fiskus | -.007 | .029 | -.029 | -.250 | .803 |
| SPPT | -.007 | .059 | -.015 | -.117 | .907 |

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Olahan Data Primer 2014

Dari tabel diatas diketahui nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* > 0,05. Artinya tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .817 ^a | .668 | .654 | 1.53493 | 1.979 |

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai d_{hitung} (Durbin- Watson) terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1,979 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

5. Analisis Regresi Berganda

Coefficients

| Model | Unstandarized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 (Constant) | 9.457 | 2.304 | | 4.105 | .000 |
| Sikap WP Mengenai Fungsi Pajak | .136 | .049 | .186 | 2.793 | .006 |
| Persepsi WP Pelaksanaan Sanksi Denda | .261 | .062 | .311 | 4.170 | .000 |
| Pelayanan Fiskus | .259 | .047 | .371 | 5.458 | .000 |
| SPPT | .269 | .098 | .202 | 2.739 | .007 |

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,457 + 0,136X_1 + 0,261X_2 + 0,259X_3 + 0,269X_4 + e$$

6. Hasil Pengujian Hipotesis

6.1 Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,793 > 1,984$ dan $sig.t (0.006) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Menurut Katz dalam Fauziah (2008) mengemukakan bahwa salah satu fungsi sikap adalah fungsi pengetahuan, dimana bila seseorang mempunyai suatu sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut terhadap objek sikap yang bersangkutan. Jadi, jika seorang mengetahui dengan jelas apa sebenarnya fungsi pajak itu sendiri maka kemungkinan mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak, dengan demikian tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota pekanbaru akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Laily Fauziah (2008) yang mengemukakan bahwa sikap wajib terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

6.2 Persepsi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan sanksi denda Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,170 > 1,984$ dan $sig.t (0.000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa Persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan Bangunan. Menurut Walgito dalam Siti dan Adi (2008) Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Sedangkan Menurut Tjahjono (2005) Sanksi Pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. hal ini berarti apabila wajib pajak mengetahui sanksi yang akan di kenakan kepadanya maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Pekanbaru sehingga dapat meningkatkan keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Fauziyah (2008) yang menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

6.3 Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,458 > 1,984$ dan $sig.t (0.000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan sendiri pada sektor

perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Cindy dan Yenni ,2013). sehingga jika pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak baik, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lancar dan tanpa ada hambatan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu sobrotul imtikhanah dan Nin Sulistyowati (2011) dan penelitian yang dilakukan oleh Hendrico (2011) yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan pajak/fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

6.4 SPPT Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,739 > 1,984$ dan $sig.t (0.007) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SPPT berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib

pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, dll (Prihartanto,2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Christian Danang Prihartanto (2013) mengenai SPPT, yang menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan waib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

7.1 Hasil Uji Simultan (F)

| ANOVA ^b | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 Regression | 473.198 | 4 | 118.299 | 50.212 | .000 ^a |
| Residual | 235.602 | 100 | 2.356 | | |
| Total | 708.800 | 104 | | | |

a. Predictors: (Constant), SPPT, Sikap WP Mengenai Fungsi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Sanksi Denda

b. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

$$\begin{aligned}
 F_{\text{tabel}} &= n - k - 1 ; k \\
 &= 105 - 4 - 1 ; 4 \\
 &= 100 ; 4 \\
 &= 2,463
 \end{aligned}$$

Dengan demikian diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} (50,212) > F_{\text{tabel}} (2,463)$ dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel-variabel independen secara bersama - sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

7.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Diketahui nilai *Adjusted R²* sebesar 0,654. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 65,4%. Sedangkan sisanya 34,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan SPPT secara simultan berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji F yang menunjukkan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} (50,212) > F_{\text{tabel}} (2,463)$ dengan Signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
2. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variable sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Ujistatistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $2,793 > 1,984$ dan signifikansi t 0.006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan

bahwa variable persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $24,170 > 1,984$ dan signifikansi t $0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variable pelayanan fiskus berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,458 > 1,984$ dan signifikansi t $0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.
5. Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variable SPPT berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,739 > 1,984$ dan signifikansi t $0,007$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.
6. Hasil pengujian R square diperoleh sebesar $0,654$ atau $65,4\%$, hal ini berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar $65,4\%$. Sedangkan sisanya $34,5\%$ dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini.

2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Pekanbaru namun diperluas menjadi seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di dinas Pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau atau daerah lainnya. Sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih menggambarkan kondisi di setiap daerah Riau.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variable independen, yaitu sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan SPPT. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan, seperti pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan.
3. Bagi instansi yang dalam hal ini Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pekanbaru perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara melakukan upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan

- kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak khususnya keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
 5. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah Laily.2008.*Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*.skripsi FE-UIN Syarif Hidayatullah
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardika, N. Sentosa . 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali*. Disertasi Universitas Airlangga : Surabaya
- Hendrico. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Lubuk Kilangan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Indrawijaya, Adam.2003. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Sinar Baru
- Intikhanah sobrotul, dan Nin Sulistyowati.2011.*Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan*.Jurnal akuntansi
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting.2013.*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Petra
- Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo. 2008. *Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Univ Trunojoyo Madura
- Pardi. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta*: Jurnal STIE “AUB” Surakarta

Prihartanto christian, Danang.
2013.*Analisis Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Melakukan
Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Studi kasus pada
wajib pajak PBB P2
Kecamatan Pesantren Kota
Kediri).*Jurnal FE-UB

Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi
Penelitian untuk Bisnis.*Buku
1 Edisi IV. Jakarta:
SalembaEmpat.

2007.*Metodologi Penelitian un
tuk Bisnis.*Buku 2 Edisi IV.
Jakarta: SalembaEmpat.

Sugiyono.2008. *Metode Penelitian
Bisnis.* Bandung : Alfabeta

Tjahjono, Achmad dan Triyono
Wahyudi.2005.*Perpajakan
Indonesia.*Raja Grafindo
Persada : Jakarta

